BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pada saat ini sedang dalam keadaan membangun. Pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah karena adanya suatu alasan yang mendasar yaitu ingin mensejahterakan dan memakmurkan rakyat yang merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. Dan pembangunan daerah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pembangunan nasional, oleh karena itu tidak ada alternative lain dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan serta menjamin keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan sektoral dan kepentingan regional.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa " Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa sesuatu yang dapat mempengaruhi hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, karena dikhawatirkan tidak terjadinya pemerataan pandapatan nasional yang hendaknya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perwujudan Pembangunan Nasional.

Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam pernyataan yang terdapat pada pasal 33 ayat (2) diatas disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan kebutuhan rakyat dimana memerlukan banyak dana yang harus

digunakan, oleh karena itu pemerintah berusaha mendapatkan dana bagi pembangunan sektor ekonomi juga sektor lainnya yang dibutuhkan rakyat Indonesia.

Suatu tindakan pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan tersebut salah satunya meminjam dana ke luar negeri yang mempunyai bunga pinjaman yang rendah atau juga dapat dengan cara menarik pajak tertentu dari masyarakat atau badan, sebagai keikutsertaan rakyat dalam pembangunan nasional Indonesia.

Dalam UUD 1945 penarikan pajak ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan " Pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pangaluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa cara menetapkan anggaran dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemeritah negara. Di dalam negara seperti Indonesia yang menganut paham Demokrasi atau negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, anggaran pendapatan ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penarikan pajak, maka yang melaksanakannya yaitu suatu badan pemerintah yang mengurus mengenai perpajakan yaitu Kantor Dinas Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan juga DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah).

1.2 Identifikasi masalah

Isu Strategis merupakan permasalahan yang dihadapi sehingga harus menjadi perhatian dan prioritas untuk ditanggulangi sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Isu Strategis yang harus selalu dihadapi :

a. Mengoptimalkan kewenangan Dinas Pendapatan di bidang pendapatan daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas Pendapatan Daerah untuk memanfaatkan IPTEK di bidang pendapatan daerah.

Bergulirnya reformasi telah menyebabkan terjadinya berbagi perubahan mendasar hampir di semua sektor kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Adanya tuntutan perubahan itu antara lain berdampak pada menurunya income atau profit bagi tiap-tiap perusahaan, khususnya di bidang pariwisata serta fasilitas yang mendukung seperti hotel dan restaurant. Karena para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan dari berbagai manca Negara menjadi enggan untuk datang. Hal tersebut disebabkan kondisi pemerintahan kita yang tidak stabil serta adanya berbagai ancaman dari terroris pada lokasi-lokasi yang merupakan lokasi yang cukup ramai untuk didatangi oleh para wisatawan.

Menurunnya jumlah wisatawan tersebut berdampak pula bagi daerah tersebut. Karena di satu sisi perusahaan tersebut harus tetap mempertahankan existensinya sebagai perusahaan swasta, dan di sisi lain perusahaan tersebut harus juga memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sedangkan keadaan akuntabilitas perusahaan tersebut sedang menurun sedemikian rupa karena faktor-faktor di atas, dengan demikian tidak sedikit perusahaan swasta, khususnya di bidang pariwista,

hotel dan restaurant, terlambat membayar atau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dengan mengamati permasalahan-permasalahan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi, khususnya di Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi, maka penulis melakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan data penulisan laporan kerja praktek. Adapun pembatasan masalah adalah meliputi :

1. Bagaimana cara mengatasi agar perusahaan-perusahaan yang terdapat di daerah tersebut dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Sistem dan prosedur pengajuan keberatan atas pajak yang diberikan kepada wajib pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Pemerintah daerah dalam mendukung terciptannya suatu hubungan yang saling menguntungkan, antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah tersebut.
- Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terdapat pada fungsi pemerintah daerah, khususnya pada bidang perpajakan perusahaan-perusahaan swasta di bidang seperti hotel dan restaurant.

- Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam mengatsi hambatan tersebut.

Adapun maksud dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

- Untuk kepentingan akademis, diharapkan hasil praktikum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kegiatan penelitian lebih lanjut di bidang ilmu Manajemen Informatika, khususnya di bidang sistem pendapatan asli daerah.
- Untuk kepentingan sendiri, kegiatan praktikum ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian keilmuan, khususnya pengembangan ilmu Manajemen Informatika, terutama dalam menganalisis sistem-sistem yang sedang berjalan di pemerintahan daerah.

1.5 Metodologi Kerja Praktek

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif.

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem yang berjalan, serta menganalisanya.

2. Metode Observasi.

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktek, serta melakukan interview kepada pegawai-pegawai yang bersangkutan dengan masalah yang penulis bahas.

3. Studi Kepustakaan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek ini dilaksanakan di **Dinas Pendapatan Daerah**, di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), di daerah Kabupaten Sukabumi, selama lebih kurang 1 bulan, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2004.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kerja praktek ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian yang dipakai, tempat dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

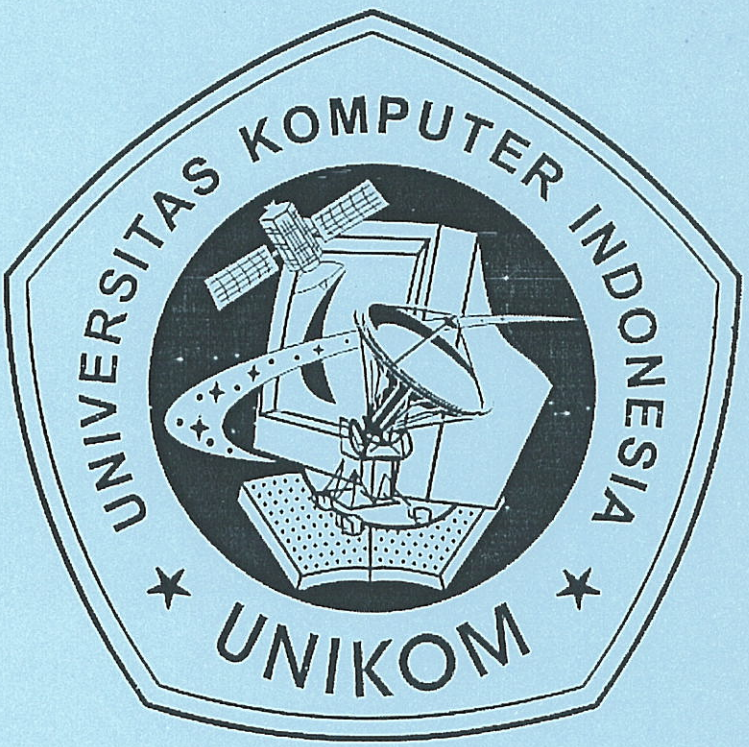
Pada bagian ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung analisis sistem, mulai dari teori pengertian sistem dan prosedur, fungsi pajak, dasar hukum pajak, sampai perangkat lunak yang digunakan untuk analisis sistem.

BAB III TINJAUAN UMUM

Pada bagian ini berisi gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah dan struktur organisasi perusahaan serta uraian tugas, deskripsi prosedur kerja dan diagram prosedur berupa flowmap, analisis aliran data berupa diagram alir data atau data flow diagram yaitu diagram konteks dan diagram alir data level.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh laporan tugas kerja praktek, serta saran untuk sistem informasi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM